PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

2025

PERBUP. MIMIKA NO. 31, BD 2025/NO. 31, 43 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK

- Untuk memberikan acuan dalam Pengelolaan Keuangan Kampung sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan mempertimbangkan kekhususan Kondisi Lokal Kampung dan Kapasitas Penyelenggara Pemerintah Kalnpung, perlu adanya pedoman tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2025;
- Dasar hukum Peraturan Bupati Mimika ini adalah UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 15 Tahun 2022, UU No. 3 Tahun 2024, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2023, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 1 Tahun 2016, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 47 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 119 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020, Permendes No. 6 Tahun 2023, Permendes No. 13 Tahun 2023, Permendes No. 2 Tahun 2024, Permendes No. 15 Tahun 2024, Permenkeu No. 108 Tahun 2024, Perda Kab. Mimika No. 11 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Bupati Mimika ini diatur tentang pengelolaan keuangan kampung tahun anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk menciptakan pengelolaan keuangan Kampung yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam mewujudkan pembangunan di Kampung. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah Kampung dalam pengelolaan keuangan Kampung. Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas: a. transparan; b. akuntabel; c. partisipatif; d. tertib; dan e. disiplin anggaran. Keuangan Kampung bersumber dari: a. pendapatan asli kampung; b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. bagian dari basil pajak daerah dan retribusi daerah; d. alokasi Dana Kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten; e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 9. lain pendapatan kampung yang sah. Kepala Kampung dan Perangkat Kalnpung berhak atas penghasilan Tetap setiap bulan selama 1 tahun anggaran. Kepala Kampung adalah PKPKK dan mewakili pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung yang dipisahkan. APB Kampung terdiri dari : a. Pendapatan Kalnpung; b. Belanja Kampung; dan c. Pembiayaan Kampung. Pengelolaan keuangan Kampung meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban. Alokasi Dana Kampung dianggarkan pada APBD Kabupaten melalui BPKAD. ADK digunakan untuk membiayai pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung, Aparat Kampung, serta Tunjangan Bamuskam, Honor Kader Posyandu, Honor Linmas, Honor RT, Honor LPM. Penggunaan Dana Kampung Tahun 2025 diprioritaskan pada 4 (empat) bidang yaitu: a. Bidang pemerintahan Kampung; b. Bidang pemberdayaan; c. Bidang Pembangunan Kampung dan Penanggulangan Bencana; dan d. Darurat dan Mendesak. Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah kampung tentang perencanaan pembangunan kampung yang menghasilkan RPKKampung. Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat kampung. Kepala Kampung wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati. Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah. Kepala Distrik berkewajiban melakukan Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa pada setiap kampung di wilayahnya masing-masing. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa.

CATATAN

- Peraturan Bupati Mimika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 22 April 2025 dan ditetapkan pada tanggal 22 April 2025.
- Semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak yang bersumber dari Dana Desa, belpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- Tata Kelola keuangan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan kampung.